

<https://jurnal-itsi.org/index.php/jitsi>; E-ISSN: 2722-4600; ISSN: 2722-4619
DOI: 10.62527/jitsi.6.1.378

Implementasi E-Government pada Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan

Aji Permana[#], Dadan Nugraha[#], Dyah Puteria Wati[#]

[#] Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan, Jl. Cut Nyak Dhien No.36A Cijoho, Kuningan, 45513, Indonesia

E-mail: [aji\[at\]uniku.ac.id](mailto:aji[at]uniku.ac.id), [dadan.nugraha\[at\]uniku.ac.id](mailto:dadan.nugraha[at]uniku.ac.id), [dyah.puteria\[at\]uniku.ac.id](mailto:dyah.puteria[at]uniku.ac.id)

ABSTRACTS

Kuningan Regency has 361 villages and 32 sub-districts consisting of village officials with their duties and authorities. In this case, village officials have not been recorded in a system, which causes a lot of data on officials that does not match the latest data, so that the DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) has difficulty collecting data on village officials such as personal identity, position, education, family data and other supporting data. Apart from data collection on apparatus, each village has institutions such as BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu, RT/RW data, innovations and legal products which have not been recorded so that the DPMD has difficulty getting these data. The village government information system in this research will assist in managing village government data such as the identity of village officials, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, innovation, legal products to the management of proposed village documents for the purposes of reporting the village financial system which includes photos of the Village APBDesa Baligho, ILPPDrab Baligho, Siskeudes Online Homepage, Siskeudes Online Financial Report and Siskeudes Online RAPBDes. The output of this research is the Kuningan Regency Village Government Information System with users divided into DPMD, District and Village parties with access levels according to their needs

Manuscript received Feb 11, 2025;
revised Feb 17, 2025. accepted Feb
22, 2025 Date of publication Mar
31, 2025. International Journal,
JITSI : Jurnal Ilmiah Teknologi
Sistem Informasi licensed under a
Creative Commons Attribution-
Share Alike 4.0 International
License



ABSTRAK

Kabupaten Kuningan memiliki 361 Desa dan 32 Kecamatan yang terdiri dari dari aparat desa dengan tugas dan wewenangnya. Dalam hal ini aparat desa belum terdata secara sistem yang menyebabkan banyaknya data aparat yang tidak sesuai dengan data terakhir, sehingga pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) kesulitan dalam melakukan pendataan aparat desa seperti identitas pribadi, jabatan, pendidikan, data keluarga dan data pendukung lainnya. Selain pendataan aparat, setiap desa memiliki lembaga seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu, data RT/ RW, inovasi dan produk hukum yang memang belum terdata sehingga pihak DPMD kesulitan untuk mendapatkan data-data tersebut. Sistem Informasi Pemerintahan desa pada penelitian ini akan membantu dalam pengelolaan data pemerintahan desa seperti identitas aparat, BPD, LPM, PKK, Karang Taruna, RT/RW, inovasi, produk hukum sampai ke pengelolaan usulan dokumen desa untuk keperluan pelaporan sistem keuangan desa yang didalamnya terdiri seperti foto Baligho APBDesa, Baligho ILPPDrab, Beranda Siskeudes Online, Laporan Keuangan Siskeudes Online dan RAPBDes Siskeudes Online. Luaran penelitian ini berupa Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan dengan pengguna terbagi menjadi pihak DPMD, Kecamatan dan Desa dengan level akses sesuai dengan kebutuhannya

Keywords / Kata Kunci — *Village Government Information System; Kuningan Regency E-Government*

CORRESPONDING AUTHOR

Aji Permana
Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Kuningan, Kuningan, 45513, Indonesia
Email: aji[at]juniku.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mengakibatkan aktivitas kehidupan manusia dalam berbagai sektor mengalami perubahan yang signifikan, hal ini menyebabkan pemerintah harus menyiapkan fasilitas dalam bentuk teknologi untuk mendukung kinerja pegawai serta pelayanan masyarakat secara digital. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan kemajuan pada bidang teknologi komunikasi dan informasi saat ini begitu pesat, sehingga menempatkan suatu bangsa pada kedudukan sejauh mana bangsa tersebut maju yang didasarkan atas seberapa jauh bangsa tersebut menguasai bidang teknologi komunikasi dan informasi [1]. E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik untuk meningkatkan efisiensi internal dan menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Pemerintah Kabupaten Kuningan mengalami permasalahan dalam pengelolaan pemerintahan desa khususnya dalam aparatur desa seperti identitas, jabatan, pendidikan, data keluarga, SK dan dokumen pendukung lainnya. Disamping itu pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang menaungi desa kesulitan mengelola data lembaga desa seperti BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga), Karang Taruna, Posyandu, data RT/ RW, inovasi dan produk hukum. Hal tersebut menjadi kendala ketika beberapa instansi lain di Kabupaten Kuningan meminta data yang dibutuhkan, dalam hal ini ketika permintaan data mengenai desa pihak DPMD akan melakukan kembali pendataan yang membutuhkan waktu yang relatif lama sehingga permintaan tersebut tertunda dan bahkan tidak terealisasi dikarenakan data tidak terdata dengan baik. Sistem informasi merupakan kombinasi teratur dari orang-orang, perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sumber daya data yang mengumpulkan, mengubah dan menyebarkan informasi dalam sebuah organisasi

2. METODOLOGI PENELITIAN

E-Government merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis, serta hal-hal lain yang berkenaan dengan pemerintahan. E-Government dapat diaplikasikan pada legislatif, yudikatif atau administrasi publik, untuk meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang demokratis. Pada intinya E-Government adalah penggunaan teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintah dan pihak-pihak lain [2]. Untuk mewujudkan cita-cita luhur good governance tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintahan atau yang umum disebut dengan e-government dapat dijadikan sebagai salah satu alat atau sebagai pintu gerbang menuju good governance. Tata Kelola pemerintahan yang baik merupakan bentuk implementasi kebijakan dan reparasi yang efektif dan responsive terhadap kebutuhan instansi maupun masyarakat. Sehingga layanan-layanan yang diberikan oleh pemerintahan sudah terkelola dengan baik. E-Government memberikan peluang baru untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, dengan cara ditingkatkannya efisiensi, layanan-layanan baru dan adanya suatu peningkatan terhadap global information infrastructure, dengan demikian e-government akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai jalan untuk mewujudkan good governance.

Metode penelitian yang digunakan dalam Implementasi E-Government Pada Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan adalah sebagai berikut :

1. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Wawancara, yang dilakukan dengan Bpk. Hamdan Harismaya, S.Kom., Msi. Selaku Kabid Pemerintahan Desa/Kelurahan di DPMD Kabupaten Kuningan mengenai proses bisnis yang berjalan dan proses bisnis yang direncanakan dalam penelitian ini.
- b. Observasi, melakukan kunjungan langsung ke DPMD serta beberapa desa untuk mengetahui proses pendataan aparatur desa beserta lembaga desa.
- c. Studi Literatur, peneliti mengumpulkan buku-buku literatur, mempelajari laporan-laporan yang dibutuhkan dan mempelajari beberapa sistem yang disediakan pemerintah seperti Sistem Informasi Profil Desa dan Kelurahan Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk menjadi bahan penelitian.

2. Metode Penyelesaian Masalah

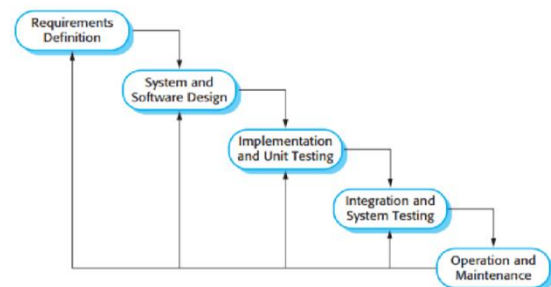
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan cara pandang yang menekankan pada ciri-ciri, sifat dan mutu suatu obyek (subyek) yang bersangkutan [3], yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan e-Government di Kabupaten Sidoarjo. Dan penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan e-Government khususnya pada upaya pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik yang meliputi :

- a. Kondisi sarana dan prasarana seperti server, jaringan dan pendukung e-Government;
 - b. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kuningan dalam implementasi kebijakan e-Government;
 - c. Sumber Daya Manusia pemerintah terhadap implementasi e-Government di Kabupaten Kuningan;
- Sedangkan untuk menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan analisis deskriptif. Analisis deskriptif yaitu analisa data yang digunakan untuk mendiskripsikan atau menggambarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Yang bertujuan untuk menunjukkan kondisi atau posisi suatu obyek pada waktu tertentu [3].

3. Metode Pengembangan Sistem

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu jenis model pengembangan aplikasi dan termasuk kedalam classic life cycle, yang mana menekankan pada fase yang berurutan dan sistematis (Sommerville, 2011) [4]. Model pengembangan ini dapat dianalogikan seperti air terjun, dimana setiap tahap dikerjakan secara berurutan mulai dari atas hingga ke bawah. Alasan peneliti menggunakan metode waterfall karena memiliki rangkaian alur kerja sistem yang jelas dan terukur, serta metode waterfall ini merupakan pendekatan yang sangat metodis, dimana setiap informasi akan tercatat dengan baik.

- a. *Requirement Analysis*, pada tahap peneliti mengumpulkan data untuk mengetahui seluruh informasi mengenai kebutuhan sistem yang diinginkan oleh pengguna dan batasan sistem yang akan dibangun. Informasi ini diperoleh dari hasil wawancara, survei dan diskusi. Setelah itu informasi dianalisis sehingga mendapatkan data-data yang lengkap mengenai kebutuhan pengguna akan sistem yang akan dibangun.



Gambar 1. Tahapan Metode Waterfall [4]

- b. *System and Software Design*, tahapan ini dilakukan proses desain bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana tampilan dari sebuah sistem yang diinginkan. Sehingga membantu menganalisis dan mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibuat secara keseluruhan.
- c. *Implementation*, tahap ini dilakukan peneliti dalam pembuatan kode program pada sistem yang akan dibangun. Pembuatan sistem akan dipecah menjadi modul-modul kecil yang nantinya akan digabungkan dalam tahap selanjutnya. Pada tahap ini dilakukan juga pemeriksaan lebih dalam terhadap modul yang sudah dibuat, apakah sudah memenuhi fungsi yang diinginkan atau belum.
- d. *Integration and Testing*, proses penggabungan modul-modul yang sudah dibuat sebelumnya dilakukan pada tahapan ini. Setelah itu akan dilakukan pengujian yang bertujuan untuk mengetahui apakah sistem sudah sesuai desain yang diinginkan.

Operation and Maintenance, pada tahapan ini sistem digunakan dan seiring berjalannya waktu peneliti melakukan perbaikan ketika ada kekurangan alur proses bisnis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

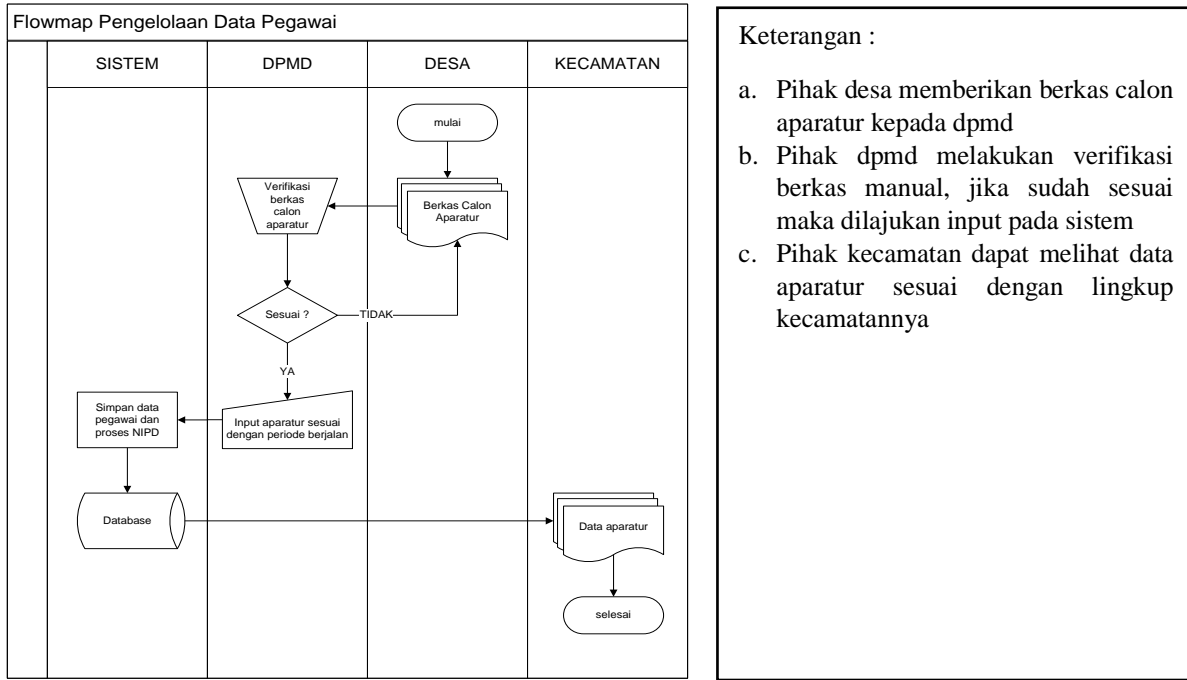
Berdasarkan masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Kuningan dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1. Pengelolaan data aparatur desa di Kabupaten Kuningan masih menggunakan cara konvensional dengan melakukan pencatatan pada microsoft excel yang menyebabkan proses loading saat membuka file terlalu lama dikarenakan jumlah aparatur desa yang mencapai +4.000 orang.
- 2. Belum adanya sebuah sistem khusus untuk pengelolaan data aparatur desa dari mulai pengajuan sebagai calon aparatur sampai dengan pembuatan NIPD (Nomor Induk Perangkat Desa).
- 3. Proses pelayanan seperti proses usulan penetapan anggota BPD, pemberhentian kades dan katdes, dan usulan lainnya seputar pelayanan masih dilakukan konvensional dan belum adanya sistem khusus yang mengelola pelayanan/ usulan tersebut.

4. Proses pelaporan terhadap MCP KPK dan pelaporan penyaluran dana desa yang belum baik sehingga memungkinkan terjadinya kesalahan pelaporan data dikarenakan tidak adanya approval.
5. Pendataan dan pengelolaan data BPD, LPM, PKK, KARTA belum baik dan banyak desa yang belum terdata sehingga beberapa dinas yang akan meminta data tersebut pihak DPMD tidak dapat memberikannya secara cepat.

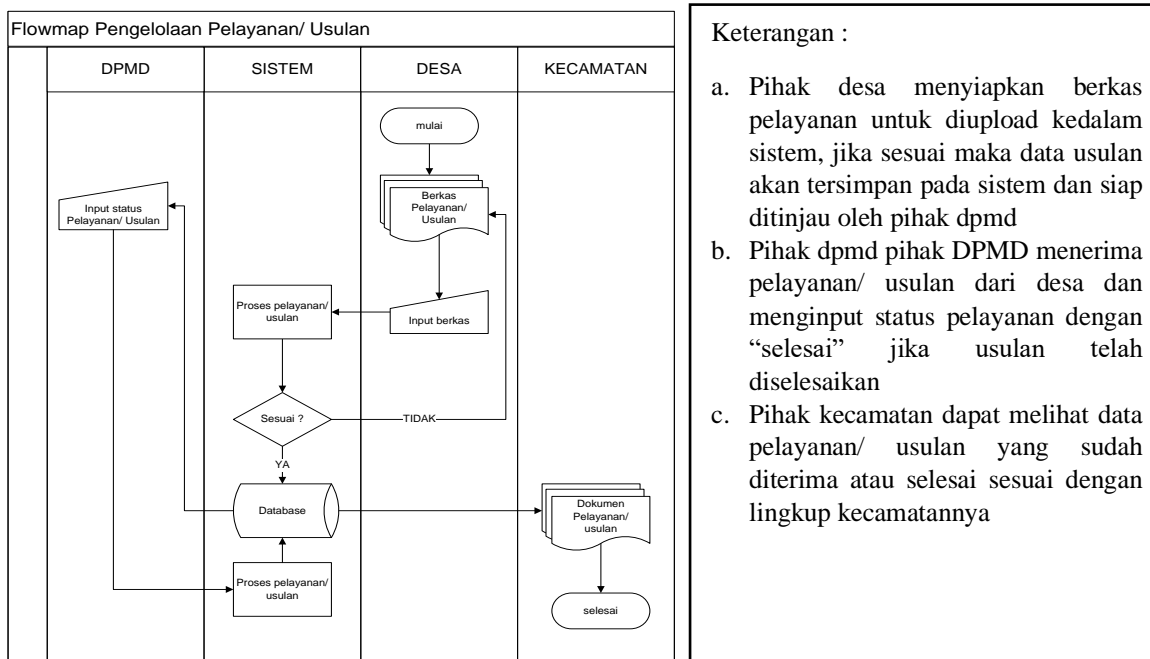
Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dibuatkan perancangan Flowmap untuk sistem yang diusulkan untuk memberikan gambaran konsep sistem yang hendak dibuat. Berikut beberapa flowmap sistem yang diusulkan:

1. Flowmap Pengelolaan Data Pegawai



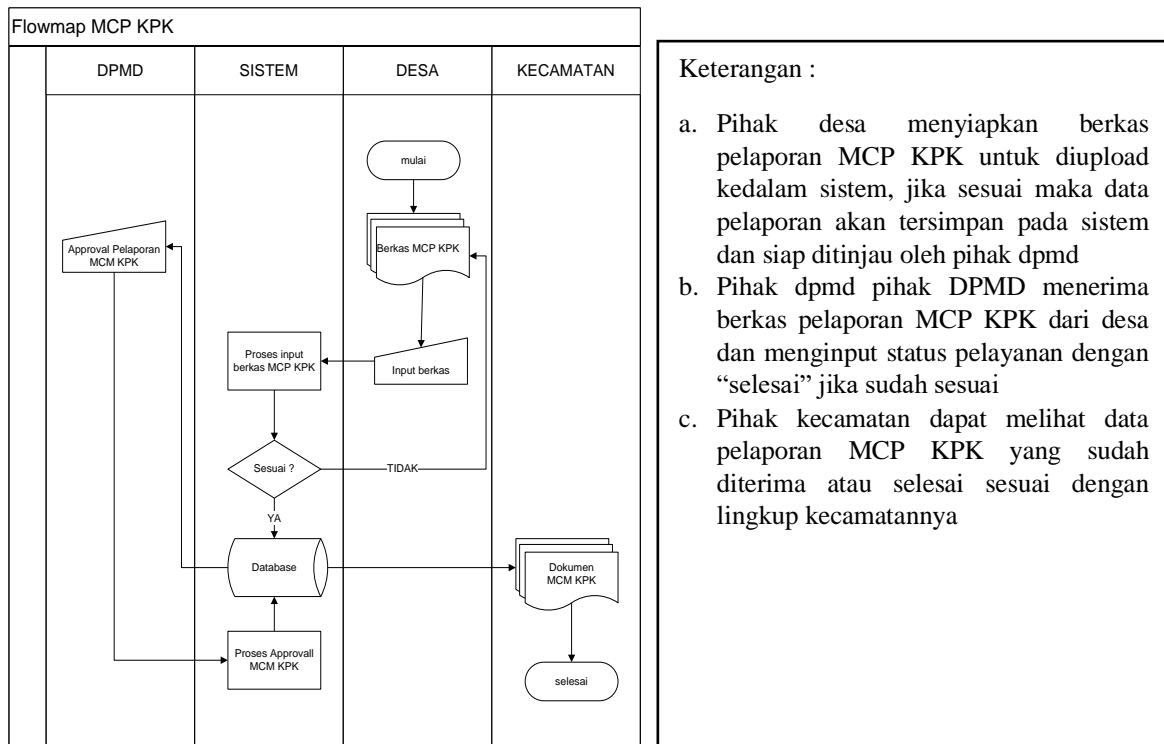
Gambar 2. Flowmap Pengelolaan Data Pegawai

2. Flowmap Pengelolaan Pelayanan / Usulan



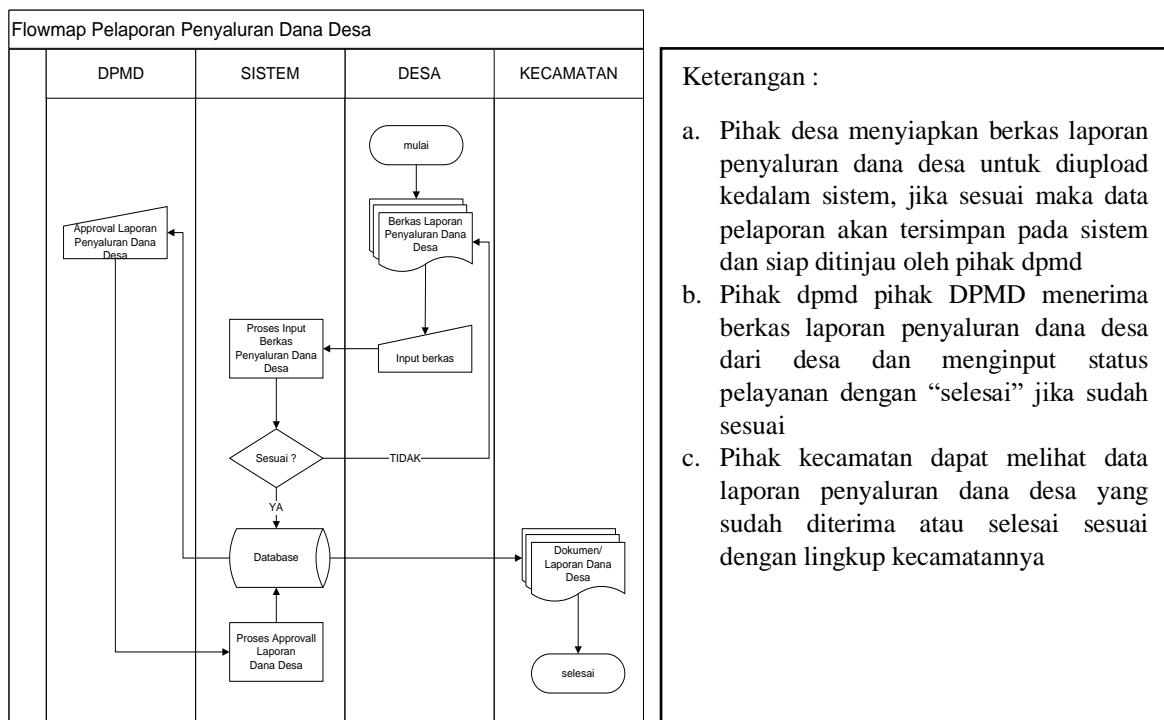
Gambar 3. Flowmap Pengelolaan Pelayanan/ Usulan

3. Flowmap MCP KPK



Gambar 4. Flowmap MCP KPK

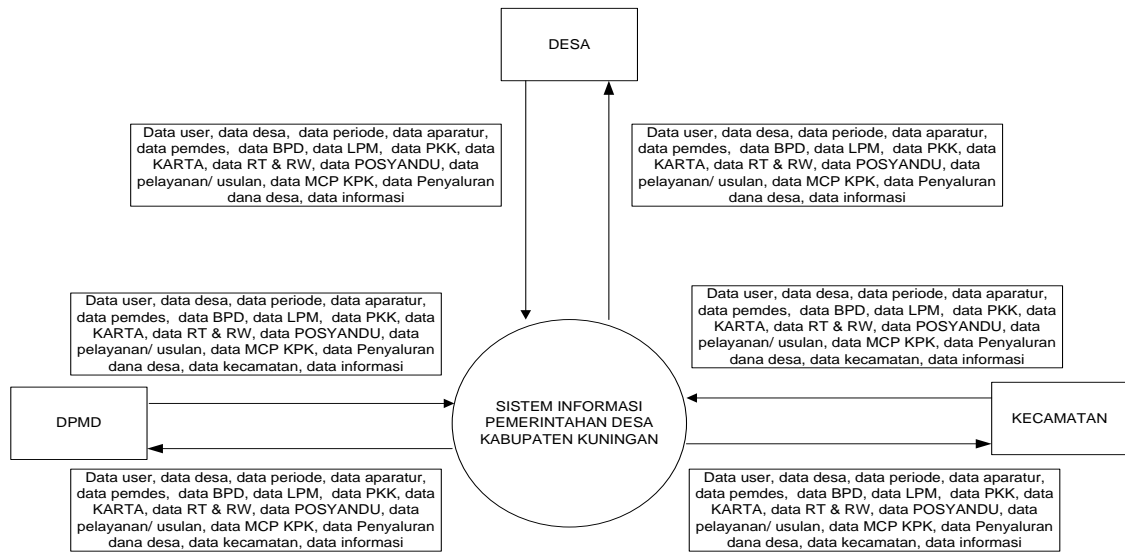
4. Flowmap Pelaporan Penyaluran Dana Desa



Gambar 5. Flowmap Pelaporan Penyaluran Dana Desa

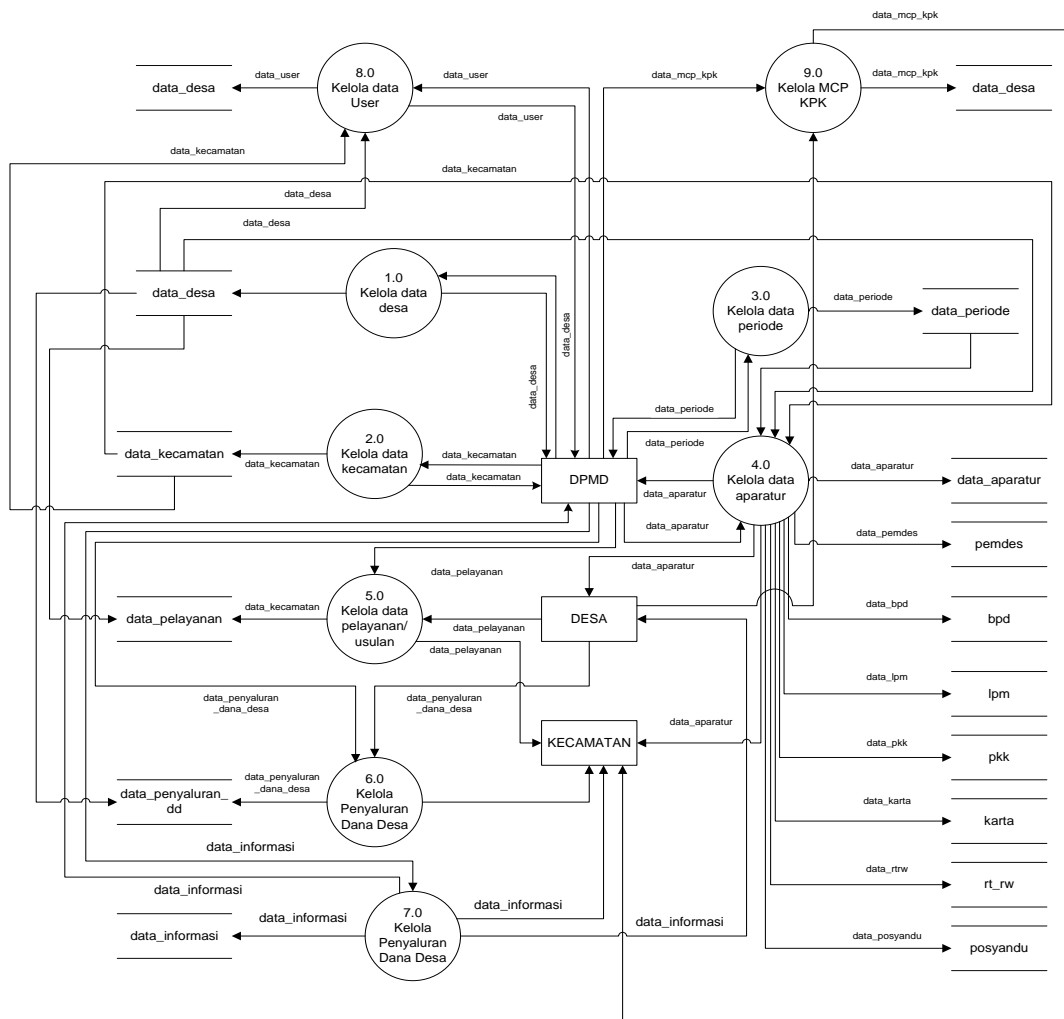
Untuk menggambarkan aliran data serta memetakan model lingkungan (menggambarkan entitas luar, masukan dan keluaran sistem) maka penulis membuat Diagram Konteks, DFD, ERD sebagai relasi entitasnya untuk perancangan basis datanya serta melakukan *white box testing* untuk menguji perangkat lunak.

1. Diagram Konteks



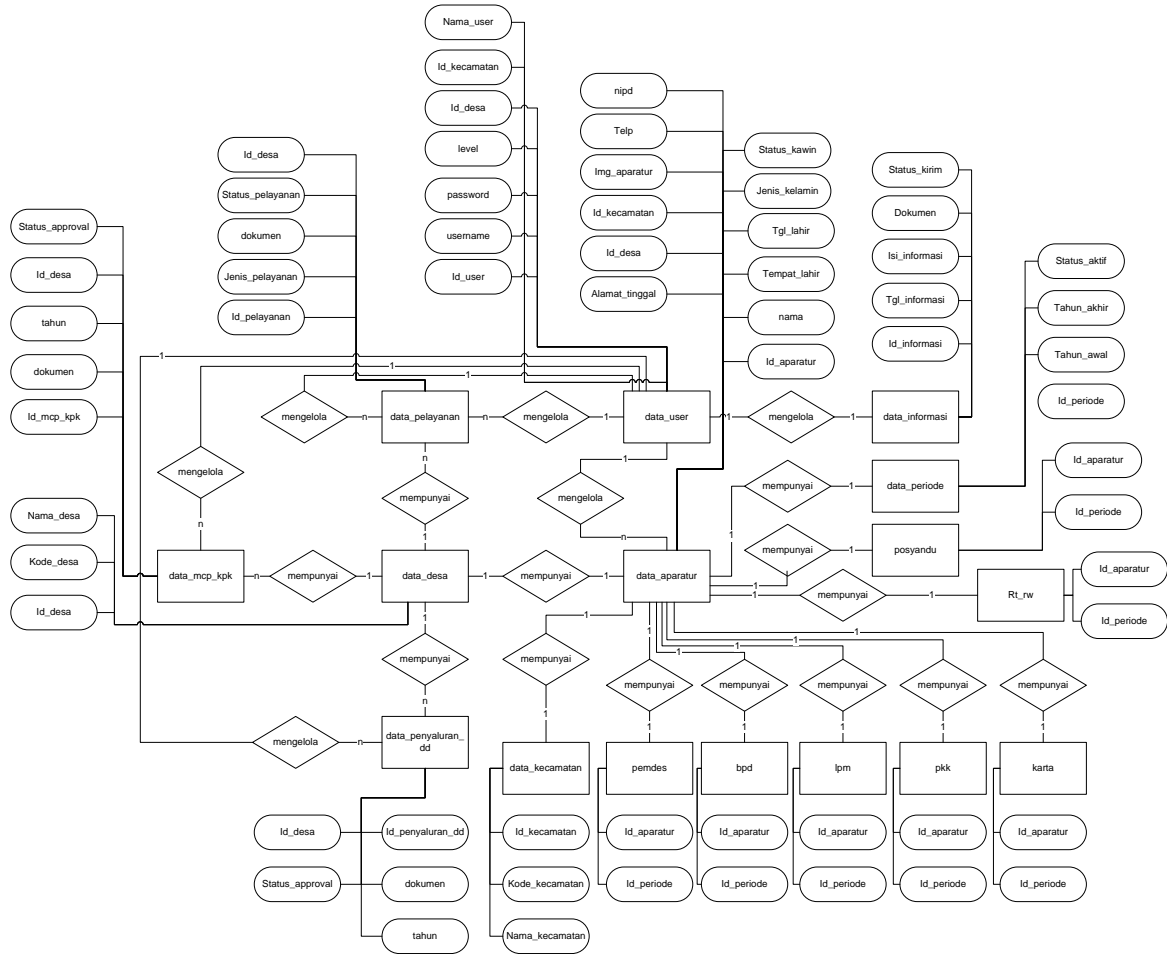
Gambar 6. Diagram Konteks

2. DFD (Data Flow Diagram)



Gambar 7. DFD (Data Flow Diagram)

3. ERD (Entity Relationship Diagram)



Gambar 8. ERD (Entity Relationship Diagram)

4. Whitebox Testing

Pengujian white box ini merupakan metode pengujian terhadap struktur dan alur logika kode program, pengujian dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap source code [26]. Adapun pengujian white box adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Source Code Input data PEMDES

Node	Code
1	<pre> \$id_jabatan = get_id('id_jabatan', 'data_pemdes'); \$prosesquery = mysqli_query(\$koneksi, "insert into data_pemdes values ('\$id_jabatan', ' . filter(\$_POST['id_mst_jabatan']) . '", ' . filter(\$_POST['no_sk_awal']) . '", ' . ifnull(format_tgl(filter(\$_POST['tgl_sk_awal']))) . '", ' . filter(\$_POST['no_sk_akhir']) . '", ' . ifnull(format_tgl(filter(\$_POST['tgl_sk_akhir']))) . '", ' . ifnull(format_tgl(filter(\$_POST['tmt']))) . '", ' . filter(\$_POST['id_periode']) . '", ' . filter(\$_POST['id_kecamatan']) . '", ' . filter(\$_POST['id_desa_kelurahan']) . '", ' . filter(\$_POST['id_pegawai']) . '", ' . ifnull(format_tgl(filter(\$_POST['tgl_pelantikan']))) . '", ' . filter(\$_POST['rekca_no']) . '", </pre>

```

        " . ifnull(format_tgl(filter($_POST['rekca_tgl']))) . ",
        " . filter($_POST['rekca_nama']) . ",
        " . filter($_POST['rekbup_no']) . ",
        " . ifnull(format_tgl(filter($_POST['rekbup_tgl']))) . ",
        " . filter($_POST['rekbup_nama']) . "));
2     if ($prosesquery) {
3     $dp = $koneksi->query("select * from data_pegawai where id_pegawai='" . $_POST['id_pegawai'] .
        """)->fetch_array();
        $id_pegawai = $dp['id_pegawai'];
        $id_kec = $_POST['id_kecamatan'];
        $tgl_lahir_lengkap = $dp['tgl_lahir'];
        $tmt = format_tgl($_POST['tgl_sk_awal']);
        $jk = $dp['jenis_kelamin'];

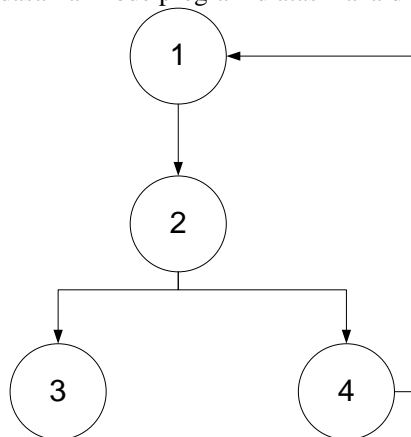
        $nipd = get_nipd($id_kec, $tgl_lahir_lengkap, $tmt, $jk);

        $cek = $koneksi->query("select * from data_nipd where id_pegawai='" . $id_pegawai .
        """)->num_rows;
        if ($cek == 0) {
            $id = get_id('id', 'data_nipd');
            $ip = $koneksi->query("insert into data_nipd values ('" . $id . "','" . $id_pegawai . "','" . $nipd . "','" .
            date('Y-m-d H:i:s') . "','" . $_SESSION['id_user'] . "')");
            if ($ip) {
                $sukses++;
            } else {
                $gagal++;
            }
        }

        ?>
        <script>
            $(function() { toast_success('Proses Data Berhasil');
            setTimeout(function() { location = "pemdes"; }, 2000); });
        </script>
        <?
4     } else {
        ?>
        <script>
            $(function() { toast_error('Proses Data Gagal'); });
        </script>
        <?
    }

```

Berdasarkan kode program diatas maka diagram alirnya adalah sebagai berikut :



Gambar 9. Flowgraph Input data PEMDES

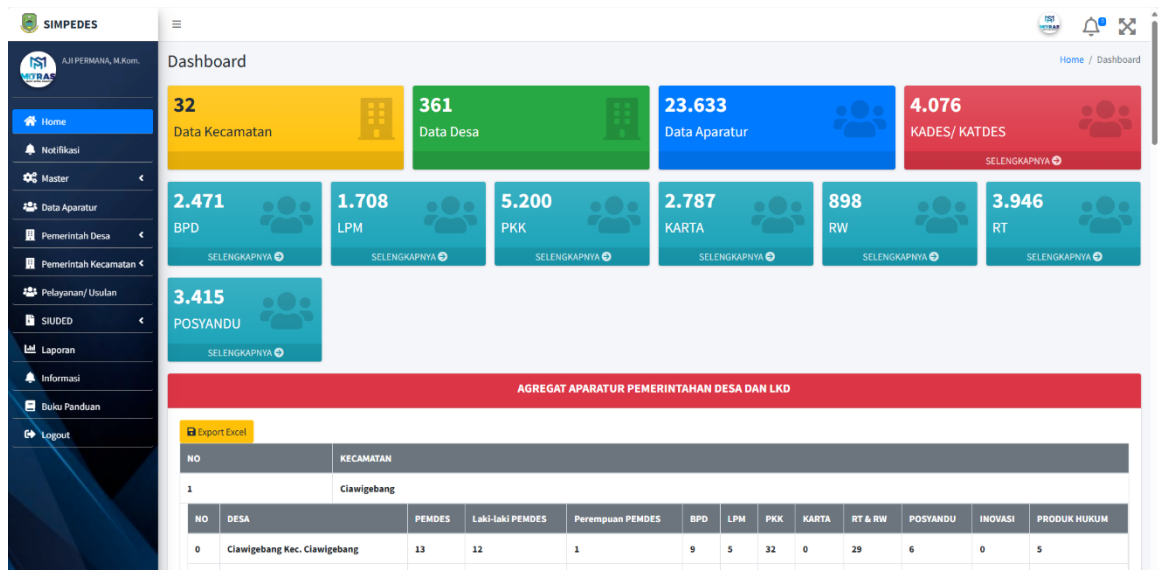
Dari Gambar 9 diatas, dapat dihitung cyclomatic complexity yakni : $V(G) = E - N + 2$
 Keterangan :
 $V(G)$ = cyclomatic complexity
 E = Total jumlah Edge
 N = Total jumlah Node
 $V(G) = 4 - 4 + 2 = 2$
 Dari hasil perhitungan Cyclomatic complexity terdapat 2 path (jalur), yaitu :

Tabel 2. Path Input data PEMDES

PATH	MENGUJI	STATUS TESTING	KETERANGAN
P1	1 – 2 – 3	Proses Data Berhasil	SUKSES Data tersimpan dan menyatakan Proses Data Berhasil
P2	1 – 2 – 4 – 1	Proses Data Gagal	SUKSES Data gagal tersimpan dan menyatakan Proses Data Gagal

Dari hasil perancangan dibuatlah sebuah program Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan yang dapat digunakan untuk pengelolaan dari mulai data desa, kecamatan, aparatur/ perangkat desa, BPD, LPM, PKK, KARTA sampai kebutuhan pelayanan dan pelaporan penyaluran dana desa. Berikut beberapa tampilan sistem dan kegunaannya :

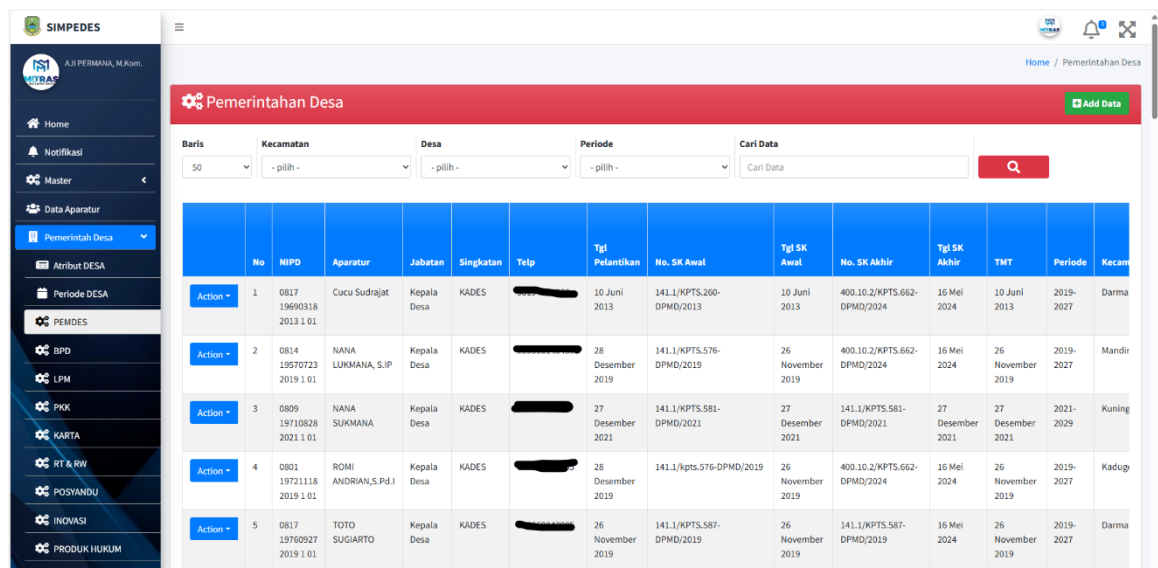
1. Halaman Dashboard



Gambar 10. Halaman Dashboard

Halaman ini adalah halaman awal ketika pengguna berhasil login, halaman ini dapat membantu pihak DPMD untuk melihat secara cepat data rekapitulasi seperti jumlah BPD, LPM, PKK dan lain sebagainya.

2. Halaman PEMDES



Gambar 11. Halaman PEMDES

Halaman PEMDES adalah proses penempatan data aparatur bekerja sebagai apa di desa dan kecamatan mana berdasarkan periode yang berjalan/ ditentukan berikut dengan jabatannya sebagai apa. Pada halaman ini juga proses NIPD (Nomor Induk Perangkat Desa) dibuatkan sebagai identitas aparatur desa sesuai peraturan daerah Kabupaten Kuningan yang sudah ditetapkan mengenai NIPD.

3. Halamann Pelayanan/ Usulan

No	Pelayanan	Tgl Usulan	Berkas	Status	Tgl Proses	Keterangan	Kecamatan	Desa
1	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	10 Februari 2025	Lihat File	MENUNGGU			Kuningan	Ancaran
2	Usulan Pemberhentian Kades dan Katdes	07 Februari 2025	Lihat File	MENUNGGU			Ciniru	Cunungmanik
3	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	04 Februari 2025	Lihat File	MENUNGGU			Jalaksana	Maniskidul
4	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	14 November 2024	Lihat File	SELESAI	12 Desember 2024		Pancalang	Mekarjaya
5	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	14 November 2024	Lihat File	SELESAI	12 Desember 2024		Pancalang	Kahiyangan
6	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	25 Oktober 2024	Lihat File	SELESAI	28 November 2024		Cilimus	Setianegara
7	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	25 Oktober 2024	Lihat File	SELESAI	28 November 2024		Cilimus	Linggassana
8	Usulan Penetapan Anggota BPD Pergantian Antar Waktu	25 Oktober 2024	Lihat File	SELESAI	28 November 2024		Cilimus	Linggajati

Gambar 12. Halaman Pelayanan/ Usulan

Proses pelayanan tertera pada menu ini. Dimana desa mendapatkan pelayanan/usulan secara online mengenai perubahan struktur perangkat desanya. Pelayanan/ usulan tersebut digunakan oleh ketika terjadi perubahan anggota BPD, penetapan anggota BPD baru, pemberhentian KADES dan KATDES dan pelayanan/ usulan lainnya yang dilengkapi dengan berkas persyaratannya.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian serta hasil pembahasan yang penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan serta saran yang nantinya diharapkan berguna dan bermanfaat dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Desa Kabupaten Kuningan. Berikut kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dengan dibuatnya sistem ini pihak DPMD dapat lebih mudah mengelola data desa, data kecamatan, data aparatur desa berikut jabatannya, BPD, LPM, PKK serta lembaga desa lainnya.
2. Sistem ini membantu proses pelayanan/ usulan dari desa seperti penggantian anggota BPD dan lain sebagainya secara cepat dan terdokumentasi.
3. Fasilitas pelaporan MCP KPK dan pelaporan penyaluran dana desa pada sistem ini dapat membantu mengantisipasi kesalahan pelaporan dengan adanya proses approval yang dilakukan oleh pihak DPMD secara sistem sebelum dilaporkan.
4. Proses permintaan data dari instansi lain tidak lagi terhambat dikarenakan data sudah tersimpan dalam database dan dapat digunakan kapanpun pada menu laporan sesuai jenis laporannya.

5. UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih peneliti ucapkan kepada Universitas Kuningan yang telah mendanai penelitian ini, dan pihak DPMD (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa) yang telah memberikan ijin untuk menjadi objek penelitian peneliti sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan lancar.

REFERENSI

- [1] Hartono, D. U., & Mulyanto, E. (2010). Electronic Government Pemberdayaan Pemerintahan dan Potensi Desa Berbasis Web. *Jurnal Teknologi Informasi*, 6(1), 9-21
- [2] Pascual, Laudon (2003). Analisa dan Perancangan Sistem Informasi Desa Berbasis Web Model Government-to-Citizen. *Jurnal Teknik Informatika*, 12(1)
- [3] Pasalong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung

- [4] Sommerville, Ian. 2011. *Software Engineering, Ninth Edition*. Boston: Addison Wesley
- [5] Presiden Republik Indonesia. 2003. Inpres No. 3 Th. 2003. *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*
- [6] A. S., Rosa dan Shalahuddin, M. 2013. *Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur dan Berorientasi Objek*. Bandung: Informatika
- [7] Sri Mulyani. 2016. *Metode Analisis dan Perancangan Sistem*, Bandung : Abdi Sisematika.
- [8] Jogiyanto, 2010. *Analisis dan Desain Sistem Informasi, Edisi IV*, Andi Offset, Yogyakarta
- [9] Andri Kristanto (2008 : 1) *Perancangan Sistem Informasi dan Aplikasinya Gava Media*, Yogyakarta.
- [10] Sutarman. 2007. *Membangun Aplikasi Web Dengan PHP dan MySQL*. GRAHA ILMU. Yogyakarta.
- [11] Ridwan A. Kambau. 2012. *Konsep dan Desain Web*. Alauddin University Press.
- [12] S. C. Zaenal A. Rozi (2015) *Bootstrap Design Framework*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- [13] Yanto, Robi. 2016. *Manajemen Basis Data Menggunakan MySQL*. Yogyakarta : Deepublish.
- [14] Cholifah, W. N., Sagita, S. M., & Knowledge, S. (2018). *Pengujian Black Box Testing Pada Aplikasi Action & Strategy Berbasis Android*.
- [15] Hutabarat, Diani. 2017. *Workshop Smart City, Wujudkan E-Government Terintegrasi Menuju Satu Data*. www.kominfo.go.id.
- [16] Hartono, Jogiyanto. 2005. *Analisis & Desain Sistem Informasi*. Yogyakarta : Andi Jusup, Al